



Desak KPK Telusuri Aliran Dana ke Pihak Lain

Kasus Suap IMB Royal Kedhaton

JOGJA, Radar Jogja - Jogja Corruption Watch (JCW) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kemungkinan adanya aliran dana ke pihak lain dalam kasus suap izin IMB Royal Kedhaton yang menyeret mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS). "Penting bagi KPK untuk menelusurinya. Jangan berhenti pada lima tersangka saja, sehingga tidak ada kesan tebang pilih dalam kasus ini," kata anggota JCW Baharuddin Kamba saat dihubungi *Radar Jogja* kemarin (23/8).

Para tersangka yang dimaksud adalah Oon Nusiho dan Dandah Jaya Kartika sebagai penyuap. Kemudian Haryadi Suyuti, Kepala DPMPSTP Nur Widhi Hartana, dan sekpi sekaligus ajudan HS bernama Triyanto Budi Yuwono sebagai penerima suap.

Ja menyebut, penyelidikan aliran dana dapat dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat terkait. Apakah wajar atau tidak, termasuk rekening yang dimiliki patut atau tidak. "Jika dalam LHKPN ditemukan ketidakwajaran atau rekening gendut, perlu ditelusuri lebih lanjut soal asal-usulnya," lontarnya.

Bila LHKPN pejabat terkait terbukti memiliki harta kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, menurut Kamba, diperlukan sanksi pidana yang mengikat, sehingga tidak hanya berhenti pada sanksi administratif saja. "Misalnya ada peningkatan jumlah kekayaan yang signifikan dan mencurigakan, maka pene-

gak hukum dapat menelusuri lebih lanjut. Jangan dibiarkan atau dibiarkan. Pengawas internal di daerah seperti inspektorat juga perlu diperkuat peran dan fungsinya," paparnya.

Selanjutnya Kamba menyinggung tidak ada kapoknya penyelenggara negara melakukan korupsi. Terutama mantan kepala daerah maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan tindak pidana korupsi berupa suap. Padahal, tidak sedikit kepala daerah, penyelenggara negara, maupun PNS ditangkap tangan KPK. "Sungguh sangat memprihatinkan dan semoga dapat menjadi pelajaran berharga bagi yang lainnya," ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap peran serta masyarakat dalam pengawasan kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia berharap pula fakta-fakta menarik yang terungkap di persidangan dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. "JCW berkomitmen akan memantau proses persidangan hingga vonis majelis hakim," tandasnya.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman juga meminta KPK untuk meluaskan kasus temuan terhadap HS. Seperti yang pernah diterapkan sebelumnya. OTT dengan uang sebesar Rp 70 juta membongkar struktur korupsi ratasan miliar yang terjadi di Probolinggo.

"Karena jarang tersangka ditangkap KPK sebagai penerima pertama. Saat ditangkap, cenderung penerima suap atau gratifikasi sudah untuk kesekian kali. Sudah bentuk kebiasaan," cecarnya.

Zaenur menjelaskan, pembongkaran struktur ini dapat dilakukan

menggunakan pendekatan tindak pidana pencucian uang (TP-U). Sebab pendekatan ini dapat membongkar aliran dana, sehingga dapat dilakukan pengejaran terhadap siapa saja yang menerima aliran dana tindak korupsi.

"Ini sekaligus membersihkan Jogja. Bukan hanya satu-satunya, tapi awal membersihkan Jogja dari tindak korupsi akut dan pembangunan ugul-ugalan tanpa memperhatikan aspek lingkungan," tandasnya.

Diharapkan pula KPK juga dapat memberi efek jera pada korporasi pemberi suap. Jadi bukan hanya pribadi pelaku suap saja yang dihukum. Tapi korporasi harus diminta pertanggungjawabannya juga. "Ini penting untuk penjeratan. Agar korporasi lain yang mau beroperasi di Jogja tidak ugul-ugalan. Tidak menggunakan cara melawan hukum seperti suap atau gratifikasi," serunya.

Sementara Berdasar surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK No Perkar 67/TUT.01.04/24/08/2022 dengan terdakwa Oon Nusiho, terungkap bahwa adanya aliran dana maupun barang ke sejumlah pihak. Salah satunya ke HS, baik diterima secara langsung maupun melalui Triyanto.

Oon memberi barang maupun uang berupa sepeda e-bike merk specialized levo FSR Men Comp Carbon 6 Fattie Carb/CMLN 95218-572 warna carbon blue dengan harga Rp 80,2 juta pada HS sebagai hadiah ulang tahun ke-55. Kemudian satu unit mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna hitam tahun 2010 nomor polisi B 680 EGR seharga Rp 280 juta. (fat/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005